

**LAPORAN MAGANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Khalida Freya Nayeli

1120 31504

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JANUARI 2024**

TUGAS AKHIR

LAPORAN MAGANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Dipersiapkan dan disusun oleh:

KHALIDA FREYA NAYELI

No Induk Mahasiswa: 112031504

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

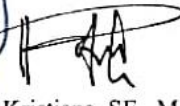
Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Bambang Suropto, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji



Deranika Ratna Kristiana, SE., M.Si., Ak., CA.



Yogyakarta, 15 Januari 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wismu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Laporan magang ini dibuat berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan kegiatan magang di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan kegiatan magang berlangsung selama 3 bulan dimulai sejak tanggal 21 Agustus hingga 21 November 2023. Selama melaksanakan kegiatan magang, penulis bekerja di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kegiatan magang ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta. Tujuan kegiatan magang adalah untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang keterkaitan antara teori dan praktik, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu dan teori yang sudah didapatkan selama menempuh perguruan tinggi. Analisis yang dibahas mengenai kesalahan dalam penulisan nomor seri oleh perangkat daerah pada surat permohonan perforasi, peretasan aplikasi SiRedjo, sulitnya koordinasi dengan perangkat daerah atau pihak-pihak yang terkait dalam kehadiran rapat, dan kendala jaringan Wi-Fi. Pembahasan masalah yang dianalisis oleh penulis yaitu melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap nomor seri yang tercantum dalam surat permohonan perforasi, melakukan backup data harian yang bisa dilakukan baik secara otomatis maupun manual untuk memastikan keamanan data, memastikan komunikasi dengan jelas terhadap perangkat daerah atau pihak-pihak terkait agar semua pihak memahami jadwal rapat yang ditetapkan, dan memperbarui jaringan melalui penambahan *bandwidth* untuk mengoptimalkan kecepatan akses internet.

Kata kunci: BPKPAD, Perforasi, FMIS, SiRedjo.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan sangat penting untuk membangun keterampilan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan tinggi tidak cukup hanya dari segi akademik, namun juga diperlukan kemampuan untuk beradaptasi saat memasuki dunia kerja. Tugas akhir merupakan metode untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menguasai ilmu yang diberikan serta kelayakan untuk berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan kompetensi yang telah diajarkan selama berada di perguruan tinggi (Anggaeni & Sujatmiko, 2013). Tugas akhir memiliki peranan penting dalam mendukung mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia kerja.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta memberikan berbagai opsi tugas akhir yang dapat dipilih sebagai bagian dari persyaratan wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi salah satunya adalah melaksanakan studi lapangan (magang). Diharapkan bahwa program magang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Melalui program magang, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan *soft skill* maupun *hard skill*.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Penulis memilih melaksanakan magang di BPKPAD

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten Purworejo bukan hanya untuk memenuhi persyaratan wajib untuk mendapatkan gelar sarjana, tetapi juga dengan tujuan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja serta untuk memahami dan mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang timbul pada dunia kerja. Selama pelaksanaan magang, penulis bekerja di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan Magang

Tujuan penulis memilih magang di BPKPAD Kabupaten Purworejo yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta.
2. Memperdalam pemahaman penulis tentang keterkaitan antara teori dan praktik, sehingga penulis dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu dan pengetahuan yang sudah didapatkan selama menempuh perguruan tinggi.
3. Memperdalam kemampuan penulis dalam melakukan interaksi, komunikasi, dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam dunia kerja.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

II. PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Profil Organisasi

Gambaran Umum BPKPAD Kabupaten Purworejo

BPKPAD merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam suatu daerah yang memiliki peran sebagai pengelola keuangan, administrator perbendaharaan, perencanaan anggaran, pengelola aset pemerintah daerah, serta penanggung jawab administrasi pendapatan daerah baik berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo dibentuk pada tahun 2007 dan beberapa kali mengalami perubahan nama hingga akhirnya diubah menjadi BPKPAD seperti yang ada saat ini. Pembentukan BPKPAD berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. BPKPAD Kabupaten Purworejo beralamat di Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo.

Visi dan Misi

Visi BPKPAD Kabupaten Purworejo sejalan dengan visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo untuk periode tahun 2021-2026, yaitu “Purworejo Berdaya Saing 2025”. Dalam upaya merealisasikan visi tersebut, BPKPAD Kabupaten Purworejo memiliki misi “Meningkatkan daya saing kualitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 dan penjabaran tugas dan fungsinya dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Tugas

BPKPAD Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sesuai dengan kewenang daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya BPKPAD merancang fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pajak daerah.
- b. Melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pajak daerah.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta pajak daerah.

- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKPAD.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi BPKPAD Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari:

1. Kepala BPKPAD

Kepala BPKPAD bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD untuk membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sesuai kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas mengoordinasikan dalam persiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas bidang, serta mendukung administrasi pada semua unit organisasi di lingkungan BPKPAD.

3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah bertugas mempersiapkan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan penyusunan rencana anggaran daerah, analisis perencanaan dan pelaksanaan belanja transfer serta data dan informasi.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah bertugas mempersiapkan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Kas Daerah, Perbendaharaan Daerah, serta penatausahaan belanja pegawai dan pembiayaan daerah.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah bertugas mempersiapkan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang akuntansi daerah, pertanggungjawaban APBD, serta pelaporan keuangan daerah.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertugas mempersiapkan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penatausahaan barang milik daerah, pengendalian dan optimalisasi barang milik daerah, dan perencanaan barang milik daerah.

7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, serta Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

8. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah bertugas mempersiapkan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengembangan, pendapatan dan penilaian pajak daerah, pengendalian dan penagihan pajak daerah serta pelayanan dan penetapan pajak daerah.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas dapat dibentuk UPT.

Aktivitas Magang

Membantu Kegiatan Perforasi Benda Berharga/Karcis

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo melakukan perforasi benda berharga/karcis sebagai bagian dari proses pengesahan lembaran karcis. Tindakan ini memberikan legalitas pada tanda bukti pemungutan retribusi yang berfungsi sebagai pengendalian pengelolaan pendapatan daerah. Pelayanan perforasi untuk benda berharga/karcis di BPKPAD Kabupaten Purworejo mencakup karcis parkir, karcis objek wisata, karcis pelayanan kebersihan pasar, dan karcis pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) puskesmas.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Diawali dari perangkat daerah membawa karcis serta surat permohonan porforasi ke BPKPAD Kabupaten Purworejo pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap jumlah karcis, nomor seri, serta tarif yang tertera pada karcis untuk memastikan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di surat permohonan porforasi. Selanjutnya, penulis membuat surat permintaan porforasi dan dilakukan porforasi terhadap karcis. Setelah karcis selesai di porforasi, penulis membuat surat pengeluaran benda berharga dan dilakukan penyerahan kembali karcis kepada perangkat daerah terkait.

Melakukan Input Pendapatan Harian Melalui Aplikasi FMIS

SIMDA-NG atau lebih dikenal dengan *Financial Management Information System* (FMIS) merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk mempermudah manajemen keuangan daerah pada Pemerintah Daerah. FMIS digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan setiap transaksi pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang disertai data dukung berupa nota debit/kredit dan Surat Tanda Setoran (STS).

Langkah-langkah penginputan pendapatan harian di aplikasi FMIS sebagai berikut:

1. Penulis membuka alamat aplikasi resmi FMIS, kemudian penulis menginputkan *username* dan *password* yang telah ditetapkan oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo lalu klik *login*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Selanjutnya pilih modul penatausahaan, klik Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), lalu klik bagian Bendahara Umum Daerah (BUD) penerimaan pendapatan.
3. Setelah klik penerimaan pendapatan akan muncul tampilan penerimaan kas Surat Tanda Setoran (STS), klik “tambah STS – Tanpa Penetapan”.
4. Berikutnya, penulis memproses penginputan data dengan memasukkan No. STS sesuai dengan urutan nomor sebelumnya. Tanggal STS serta keterangan disesuaikan dengan informasi yang tercantum pada rekening koran. Pilihan bank diisi dengan Bank Jateng Cabang Purworejo. Untuk penandatanganan yang meliputi nama, NIP, dan jabatan penandatanganan diisi dengan biodata bendahara penerimaan. Jika semua sudah terisi, lakukan klik pada opsi simpan.
5. Jika sudah tersimpan, langkah selanjutnya adalah mengisi rincian surat tanda setoran dari akun yang sudah diinput dengan klik “tambah rincian surat tanda setoran”. Penginputan rekening disesuaikan dengan informasi yang sebelumnya tercantum pada keterangan, sedangkan nilai diisi dengan saldo kredit yang ada pada rekening koran. Keterangan disesuaikan dengan nama rekening yang tercantum. Jika semua sudah terisi, lakukan klik pada opsi simpan.

Merincikan Data terkait Retribusi Pelayanan Pasar

Penulis ditugaskan untuk merincikan data terkait dengan retribusi pelayanan pasar. Data tentang retribusi pelayanan pasar didapatkan dari pembukuan di masing-masing pasar. Tujuan perincian data yaitu untuk mendapatkan hasil ketetapan, pembayaran, dan piutang per individu per hari pasar selama setahun yang nantinya akan dimasukkan ke aplikasi E-Pasar.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menulis Agenda Surat Masuk

Alur pengagendaan surat masuk di BPKPAD dimulai dari penerimaan surat masuk oleh staf sekretariat yang bertugas untuk melakukan proses pengagendaan. Setelah surat diterima, selanjutnya surat tersebut diagendakan dan dilampirkan lembar disposisi. Selanjutnya, surat akan disediakan kepada Kepala BPKPAD untuk dilakukan disposisi lebih lanjut. Surat dikembalikan kepada staf sekretariat untuk dicatat hasil disposisi dan keterangan disposisi. Surat dan disposisi kemudian akan diteruskan sesuai dengan instruksi disposisi yang telah ditentukan. Hasil disposisi akan diterima oleh bidang yang terkait.

Apabila surat tersebut berada di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, proses pengagendaan selanjutnya akan dilakukan oleh penulis. Setelah pengagendaan, surat akan dilampirkan lembar disposisi. Surat kemudian disediakan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk dilakukan disposisi lebih lanjut. Setelah kepala bidang melakukan disposisi, surat dikembalikan kepada penulis untuk dicatat hasil disposisi dan keterangan disposisi. Selanjutnya, surat tersebut akan penulis serahkan kepada kepala subbidang atau staf yang terkait untuk dilakukan tindakan sesuai dengan disposisi yang telah ditetapkan.

Membantu Jalannya Proses Rekonsiliasi

Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dan Rekonsiliasi Benda Berharga/Karcis merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo. Pada saat dilaksanakan rekonsiliasi, penulis bertugas mengarahkan perangkat daerah yang akan melakukan rekonsiliasi untuk mengisi daftar hadir dan mengarahkan perangkat daerah kepada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengawas pelaksana rekonsiliasi. Selain itu, penulis juga ditugaskan untuk menangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari perangkat daerah. Surat Perjalanan Dinas merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain. Dokumen ini akan penulis serahkan ke kepala subbidang yang bersangkutan untuk ditandatangani kemudian distempel sebagai bukti pengesahan. Penulis juga bertugas untuk memberikan hasil laporan berita acara rekonsiliasi terhadap perangkat daerah yang terkait. Laporan berita acara penting agar tersedia data resmi yang akurat setiap bulannya.

Membantu dalam Pelaksanaan Rapat

Pada saat diadakan rapat oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, penulis ditugaskan untuk membantu dalam pelaksanaan rapat seperti mengurus daftar hadir, membantu mendistribusikan snack, serta mendokumentasikan rapat. Penulis juga diizinkan untuk mengikuti jalannya rapat yang bertujuan agar penulis memahami proses yang terjadi dalam rapat dari awal rapat dilaksanakan hingga selesainya rapat dan menambah wawasan baru tentang dunia kerja.

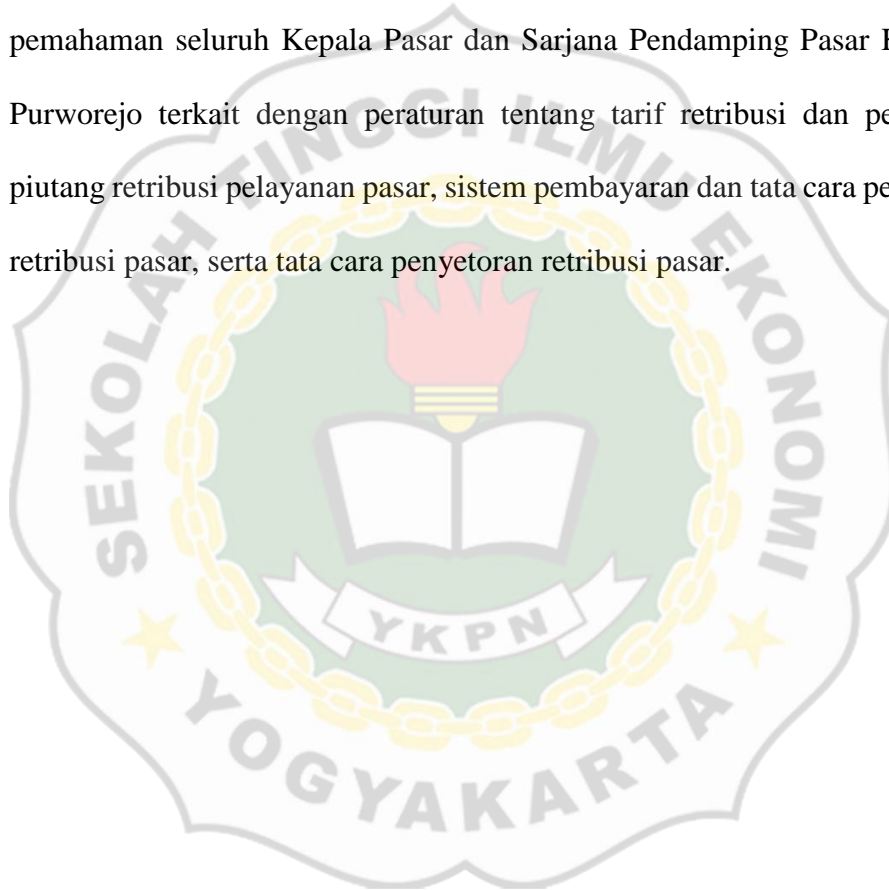
1. Rapat tentang Koordinasi Update Aplikasi E-Retribusi Daerah dan SiRedjo

Tujuan dari dilaksanakannya rapat ini adalah untuk meningkatkan keamanan dari aplikasi SiRedjo dan E-Retribusi serta kewaspadaan yang berkaitan dengan kerusakan sistem pada aplikasi SiRedjo. Rapat ini dihadiri oleh bendahara penerimaan perangkat daerah pengelola pendapatan Kabupaten Purworejo. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan ke depannya tidak akan ada gangguan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dapat menghambat kinerja aplikasi sehingga aplikasi dapat berjalan tanpa adanya masalah teknis.

2. Rapat tentang Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar
Tujuan dari dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah untuk memperluas pemahaman seluruh Kepala Pasar dan Sarjana Pendamping Pasar Kabupaten Purworejo terkait dengan peraturan tentang tarif retribusi dan pengelolaan piutang retribusi pelayanan pasar, sistem pembayaran dan tata cara pembayaran retribusi pasar, serta tata cara penyetoran retribusi pasar.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

III. LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Definisi Akuntansi Sektor Publik

Menurut Siregar (2017), akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan kejadian dan transaksi keuangan, serta penyajian hasilnya. Sektor publik adalah sektor yang mengelola dana masyarakat. Organisasi utama yang termasuk kategori sektor publik adalah pemerintahan, termasuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain instansi pemerintah, ada berbagai organisasi lain yang diklasifikasikan sebagai organisasi sektor publik, seperti rumah sakit, lembaga sosial masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perguruan tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut, akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan sektor publik.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keuangan daerah. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Siregar (2017), pendapatan daerah merupakan semua dana yang masuk ke rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran terkait yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali.

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2014), sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang melakukan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan proses data sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh para pembuat keputusan. Komponen utamanya melibatkan manusia, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal serta tindakan keamanan.

Komunikasi Bisnis

Komunikasi bisnis adalah bentuk komunikasi yang digunakan dalam konteks dunia bisnis, melibatkan berbagai jenis komunikasi, baik verbal maupun nonverbal untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Purwanto, 2011).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Adapun beberapa kendala selama penulis melakukan kegiatan magang di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, di antaranya:

1. Kesalahan dalam penulisan nomor seri oleh perangkat daerah pada surat permohonan perforasi

Kesalahan dalam penulisan nomor seri pada surat permohonan perforasi dapat mengakibatkan penggunaan nomor seri yang sama secara berganda. Dampak dari kesalahan dalam penulisan nomor seri pada surat permohonan perforasi dapat menyebabkan kerugian administratif dan ketidaksesuaian antara pendapatan yang tercatat dengan transaksi yang sebenarnya.

2. Peretasan aplikasi SiRedjo

Selama 3 hari, aplikasi SiRedjo mengalami gangguan pada sistem dan data oleh peretas yang mengakibatkan aktivitas operasional para pengguna terganggu. SiRedjo mengalami peretasan yang menyebabkan kehilangan data sejak awal tahun anggaran 2023. Upaya pemulihan data memakan waktu selama seminggu.

3. Sulitnya koordinasi dengan perangkat daerah atau pihak lain dalam kehadiran rapat

Sulitnya koordinasi dengan perangkat daerah atau pihak lain untuk mematuhi jadwal dalam penyelenggaraan rapat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya perbedaan prioritas atau kepentingan dan kesulitan dalam menyelaraskan jadwal antar perangkat daerah yang berdampak pada terbuangnya waktu serta memengaruhi produktivitas dan efektivitas rapat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Kendala jaringan Wi-Fi

Selama penulis mengakses aplikasi atau website untuk penginputan data, penulis dihadapkan pada kendala jaringan Wi-Fi yang kurang lancar. Hal ini menyebabkan proses untuk mengakses data tidak lancar dan pengunggahan data terhambat oleh koneksi yang sering terputus. Kondisi jaringan yang kurang stabil juga memperlambat penginputan data sehingga penulis harus lebih teliti agar data yang diinput tetap akurat.

Pembahasan

1. Solusi dari kesalahan penulisan nomor seri pada surat permohonan perforasi yaitu melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap nomor seri yang tercantum dalam surat permohonan perforasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang efektif dengan perangkat daerah terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kesalahan pada penulisan nomor seri.
2. Solusi dari peretasan aplikasi SiRedjo yaitu melakukan *backup* data harian yang bisa dilakukan baik secara otomatis maupun manual untuk memastikan keamanan data. Adanya *backup* secara rutin dapat membantu memulihkan data dengan cepat jika terjadi kehilangan data yang diakibatkan oleh kesalahan sistem ataupun peretasan. Selain *backup*, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna dalam memahami risiko keamanan yang muncul saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk mengakses website atau aplikasi pemerintah menjadi aspek yang dapat menjaga keamanan informasi pemerintah. Selain itu, pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengguna tentang perlindungan data pribadi dengan tidak membagikannya secara sembarangan.

3. Solusi untuk mengatasi sulitnya koordinasi dengan perangkat daerah atau pihak lain dalam kehadiran rapat, antara lain memastikan komunikasi yang jelas agar semua pihak memahami jadwal yang telah ditetapkan, memberikan pemahaman kepada perangkat daerah atau pihak-pihak terkait mengenai manfaat dan pentingnya kehadiran setiap perangkat daerah dalam rapat tersebut, menyediakan agenda rapat yang jelas dan rinci sehingga perangkat daerah akan lebih termotivasi untuk hadir karena mengetahui relevansinya dengan pekerjaan mereka.
4. Solusi untuk mengatasi kendala jaringan Wi-Fi yang kurang stabil dapat dilakukan dengan tindakan seperti memperbarui jaringan melalui penambahan *bandwidth* untuk mengoptimalkan kecepatan akses internet dan melakukan perawatan jaringan Wi-Fi secara rutin untuk menjaga kestabilan jaringan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

V. KESIMPULAN, REKOMENDASI, DAN REFLEKSI DIRI

Kesimpulan

Setelah pelaksanaan magang, penulis menyimpulkan:

1. Perlunya dilakukan sosialisasi yang efektif dengan perangkat daerah terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kesalahan pada penulisan nomor seri. Dengan cara tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi kerugian administratif dan menghindari ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan transaksi yang sebenarnya.
2. Pentingnya dilakukan *backup* data harian yang bisa dilakukan baik secara otomatis maupun manual untuk memastikan keamanan data dari aplikasi pemerintah untuk melindungi dari kemungkinan kehilangan data yang bisa terjadi akibat peretasan, kesalahan sistem baik internal maupun eksternal.
3. Perlunya memastikan komunikasi yang jelas agar semua pihak memahami jadwal rapat yang telah ditetapkan, memberikan pemahaman kepada perangkat daerah atau instansi terkait mengenai manfaat dan pentingnya kehadiran setiap perangkat daerah dalam rapat tersebut.
4. Dengan jaringan yang stabil, pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota organisasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan operasional organisasi.

Hubungan antara kegiatan teori dengan aktivitas magang di BPKPAD Kabupaten Purworejo terlihat dalam beberapa aspek. Dalam konteks akuntansi sektor publik, magang melibatkan kegiatan perforasi benda berharga/karcis dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kegiatan rekonsiliasi. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi mencerminkan penerapan konsep sistem informasi melalui penggunaan aplikasi FMIS, SiRedjo, E-Retribusi Daerah. Terakhir, komunikasi bisnis relevan dalam konteks magang dalam mencerminkan pentingnya komunikasi internal dan eksternal untuk menciptakan nilai bagi kelangsungan bisnis dan meningkatkan kinerja organisasi.

Rekomendasi

Setelah menyelesaikan periode magang selama 3 bulan, penulis berkeinginan untuk memberikan beberapa saran guna meningkatkan dan memperbaiki jalannya kegiatan magang dengan harapan agar kedepannya dapat berjalan lebih lancar.

Berikut beberapa rekomendasi yang penulis berikan:

1. Bagi BPKPAD Kabupaten Purworejo
 - a. Diharapkan pembimbing organisasi memastikan bahwa pemegang baru merasa diterima dan siap menghadapi lingkungan baru di dunia kerja. Pembimbing memiliki peran penting dalam memberikan informasi, arahan, dan dukungan agar pemegang baru dapat merasa percaya diri dalam lingkungan kerja yang belum familiar.
 - b. Diperlukan perhatian pegawai BPKPAD Kabupaten Purworejo terhadap disiplin kerja yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai, khususnya melaksanakan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan. Disiplin waktu mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
2. Bagi STIE YKPN Yogyakarta

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Diharapkan penyelenggaraan workshop dan seminar dapat ditingkatkan dengan fokus untuk mempersiapkan dan meningkatkan keterampilan praktis yang diperlukan di lingkungan kerja.
- b. Diharapkan STIE YKPN dapat membangun kerjasama dengan BPKPAD Kabupaten Purworejo untuk memastikan kesepahaman terkait tujuan dan harapan dari kedua belah pihak.

Refleksi Diri

Melalui program magang, penulis mendapatkan pengalaman praktis yang berharga dalam lingkungan kerja sesungguhnya. Adanya program magang tidak hanya meningkatkan ilmu serta keterampilan, tetapi juga memberikan wawasan terhadap tantangan yang mungkin dihadapi oleh penulis di masa depan yang membuat penulis merasa termotivasi untuk terus berkembang dan belajar menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

Selain itu, penulis berhasil meningkatkan kemampuan beradaptasi di lingkungan magang, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan kerja, dapat menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi yang digunakan dalam lingkungan kerja, dan mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Adin, Z., & Hafni Yunia Izzati, I. (2023). Dasar-Dasar Komunikasi Bisnis. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 3(1), 33–42.
<https://doi.org/10.29313/jrmk.v3i1.2324>
- Anggaeni, P., & Sujatmiko, B. (2013). Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web (Studi Kasus D3 Manajemen Informatika Te Ft Unesa). *Jurnal Manajemen Informatika*, 2(2), 37–45.
- Mahendra, D., Santosa, J., & Tri Haryanto, A. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan yang Handal. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 32–39. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1007>
- Purwanto, D. (2011). *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo*.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, 1–143.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah*. 144, 1–74.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2014). Sistem Informasi Akuntansi: Accounting information systems (Edisi 13). In *Information Technology and Innovation Trends in Organizations - ItAIS: The Italian Association for Information Systems*.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. UPP STIM YKPN.